BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Di Indonesia pendapatan Daerah menjadi tolak ukur Pemerintah Daerah untuk dapat mengelola keuangan sebagai sarana untuk meningkatkan pelayanan publik. Akan tetapi, Pemerintah Daerah selalu merasa bahwa sumber dana yang dimilikinya kurang memadai (Nugraha, 2019).

Menurut Muluk (2006:77) terdapat beberapa sumber pendapatan Daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (*Locally Raised Revenue*), Dana Transfer dari Pemerintah Pusat (*Transferred or Assigned Income*) dan Pendapatan Lain-Lain Daerah yang Sah. Dimana sumber Pendapatan Daerah ini menjadi indikator dalam perhitungan Desentralisasi Fiskal. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat 7 dapat diketahui bahwa Pendapatan Daerah adalah semua yang menambah kekayaan bersih dari hak Daerah dalam satu periode tahun anggaran berjalan. Dalam beberapa waktu terakhir, banyak Pemerintah Daerah yang ketergantungan dengan Dana Transfer atau dapat disebut juga Dana Perimbangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat yang dipicu oleh fenomena ekonomi politik yang disebabkan oleh bertambahnya kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, bertambahnya penghasilan Pemerintah Pusat yang bersumber dari pajak, dan ketidak cukupan Pendapatan Asli Daerah untuk memenuhi peningkatan pelayanan publik.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk membiayai kebutuhan operasional

pada Pemerintah Daerah. Terdapat beberapa sumber yang meliputi Dana Transfer yaitu Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus (Halim, 2004:69).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 pasal 1 ayat 11, Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Maka dari itu, Dana Alokasi Umum diprioritaskan untuk Daerah yang memiliki keuangan rendah. Dana Alokasi Umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahunnya mengalami peningkatan sesuai dengan Daerah masing masing.

Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk memfokuskan keadilan fiskal dari Pemerintah Pusat dalam hal pemberian Dana Alokasi Umum yang berbanding lurus dengan jumlah satuan administrasi Daerah melainkan bukan jumlah penduduk disuatu Daerah. Maka dari itu sesuai permasalahan dengan sistem tersebut membuat Provinsi dengan jumlah Kota dan Kabupaten yang banyak mendapatkan dana berlimpah sedangkan Provinsi dengan jumlah Kota/Kabupaten sedikit mendapat kucuran dana yang rendah sehingga Daerah tersebut masih tertinggal dalam segi ekonomi dan kasus ini dapat membuat ketergatungan suatu Daerah terhadap transfer dana dari Pemerinta Pusat. Seharusnya Pemerintah Pusat menentukan pengalokasian dana tersebut dilihat dari administrasi Daerahnya dimana Provinsi yang memiliki Kota dan Kabupaten yang dapat mengasilkan Pendapatan Asli Daerah sendiri menerima alokasi dana transfer dari Pemerintah

Pusat secukupnya untuk menutupi kekurangan anggaran yang tidak memadai dari Pendapatan Asli Daerah dan sebaliknya untuk Daerah yang tertinggal dalam penghasilan Pendapatan Asli Daerah yang tidak memadai untuk menutupi kekurangannya maka diberikan alokasi dana yang sesuai untuk proses pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, serta pengurangan kemiskinan dalam pemerataan keuangan Daerah (Okezone.com, 2019).

Pada Tahun 2019, Pemerintah Kota Tasikmalaya berupaya akan merencanakan pengalokasian Dana Alokasi Umum untuk Dana Kelurahan dengan pemecahan anggaran akan dibagi secara proposional dimana hanya wilayah yang memiliki luas, jumlah penduduk, dan jumlah warga miskin yang telah memenuhi indikator yang berlaku untuk mendapatkan Dana Kelurahan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan disetiap Daerah. Dengan adanya perencanaan Dana Kelurahan yang bertujuan untuk pemerataan keuangan disetiap Daerah maka dari itu dengan peningkatan Dana Alokasi Umum dapat diketahui Kota Tasikmalaya masih ketergantungan dengan transfer dana dari Pemerintah Pusat untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat (CNN Indonesia, 2019).

Sedangkan pada tahun 2020, dengan situasi darurat akibat wabah *Covid-19* Pemerintah Kota Tasikmalaya mengeluarkan beberapa kebijakan serius mulai dari kebijakan pembatasan wilayah parsial dan rencana pembentukan tim gugus tugas *Covid-19* tingkat RW. Terkait rencana tersebut Pemerintah Kota Tasikmalaya meminta seluruh Dana Kelurahan untuk tidak dipergunakan terlebih dahulu karena akan dialihkan untuk pencegahan korona di setiap kelurahan seluruh Kota Tasikmalaya (Saefuloh, 2020).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat 12 Dana Alokasi Khusus adalah dana transfer yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagai sumber kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Kegiatan khusus yang dimaksud yaitu untuk prioritas nasional pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana Pemerintah Daerah, dan lingkungan hidup, serta untuk membiayai kegiatan khusus yang tidak dapat diperkirakan secara umum dan juga kemampuan dalam Pendapatan Asli Daerah yang hanya mampu mengumpulkan maksimal 15% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga Pemerintah Daerah sangat memerlukan transfer Dana Alokasi Khusus dari Pemerintah Pusat ini untuk memenui kebutuhan keuangan dalam rangka menutupi anggaran khusus yang tersedia.

Wali Kota Tasikmalaya, H. Budi Budiman optimis penyerapan APBD tahun 2019 lebih dari 90 persen mulai dari dana kelurahan hingga pengerjaan fisik. Meskipun masih berproses di 10 hari terakhir bulan Desember ini. Ia mengatakan, jika penerapan anggaran rendah akan berpengaruh terhadap transfer dana dari pusat dan provinsi. Sebab kebijakan Kementerian Keuangan lebih ketat terhadap kinerja pemerintah daerah (Bukhari, 2019).

Sedangkan pada Tahun 2020, Pemerintah Kota Tasikmalaya menyiapkan anggaran untuk menangani *Covid-19* dengan status penanganan sudah ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) non-alam yang bersumber dari dana tanggap darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dana Alokasi Khusus

Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya yang akan digunakan untuk alat pelindung diri petugas medis (iNewJabar.id, 2020).

Desentralisasi fiskal adalah pemberian kewenangan fiskal dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan diwujudkannya sistem Otonomi Daerah yang memberikan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Daerah dapat langsung memutuskan suatu kebijakan tanpa campur tangan Pemerintah Pusat (Muluk, 2006)

Otonomi daerah merupakan sistem yang didesain sebagai upaya percepatan pembangunan dan distribusi kesejahteraan masyarakat, berbeda dengan pola sentralistik masa orde baru, otomomi daerah telah merekatkan rentang jarak antara Negara dengan masyarakat untuk memungkinkan masyarakat daerah mengatur sendiri sumber daya lokalnya. Desentralisasi telah menempatkan kepentingan lokal sebagai isu utama, dimana masyarakat lokal dikonsepsikan sebagai aktor yang paling tahu tentang kebutuhan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat daripada Pemerintahannya sendiri. Diperlukan paragdima ekonomi yang tepat yakni bagaimana Pemerintah Daerah mempu menjadi moderator, fasilitator dan promotor yang mampu menampilkan potensi terbaik daerahnya dalam memanfaatkan peluang kerjasama yang ada serta dapat mensejahterakan masyarakatnya (radartasikmalaya, 2020).

Oleh karena itu, Pemerintah Pusat memberikan sebagian kewenangan fiskal untuk memberikan alokasi dana yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah yang dapat disebut sebagai Desentralisasi Fiskal. Maka dari itu pengalokasian dana yang dimaksud adalah Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang terdiri dari Dana

Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Pajak dan Sumber Daya Alam, dan dana Otoritas Khusus yang berpengaruh terhadap desentralisasi fiskal tersebut. Sehingga menjadi bukti bahwa Pemerintah Pusat telah memberikan kepercayaaan kepada Pemerintah Daerah untuk menjalankan kewenangan dalam pengelolaan keuangan Daerah yang telah diberikan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yuritis, keagamaan, moneter dan fiskal secara mandiri. Sehingga, dengan adanya hal tersebut dapat dikehatui dana yang telah dihimpun untuk di analisis pembagiannya sehingga dapat dialokasikan sesuai dengan kepentingan dalam anggaran keuangan di Daerah tersebut (Nugraha, 2019).

Berdasarkan penelitian terdahulu dapat diketahui Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara signifikan berpengaruh positif terhadap Desentralisasi Fiskal sesuai dengan (penelitian Andrini Agus Tiyaningsih Tahun 2009; penelitian Muhamad Yamin Noch, Made Sudarma, Gugus Irianto, dan Ali Djamhuri Tahun 2015; Penelitian Thi Thuy Nguyen Tahun 2016; penelitian Joko Tri HaryantoTahun 2017; penelitian Agus Bandiyono2017; penelitian Aidil Fikri Hasirimi, Prof. Erlina. SE., M.Si., Ph.D., Ak., CA, dan Prof. Dr. H. B. Tarmizi. SU. Tahun 2017; penelitian Idhar Yahya, Erlina, Ade Fatma, Lubis dan Murni Daulay Tahun 2018). Dapat diketahui dari hasil perhitungan uji F bahwa semakin tingginya Kemandirian Fiskal maka pengalokasiannya untuk Dana Perimbangan yang juga termasuk Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi khusus yang diperhitungkan bersama akan tinggi dan berpengaruh kepada Desentralisasi Fiskal (Purnima, 2017).

Namun hasil berbeda bahwa Dana Aokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara signifikan berpengaruh negatif terhadap Desentralisasi Fiskal sesuai dengan (penelitian Enceng, Liestyodono B Irianto dan Purwaningdyah MW Tahun 2012; penelitian Anastasia Sianturi, Sjamsiar Sjamsuddin, dan Tjahjanulin Domai Tahun 2013; penelitian R Agoes Kamaroellah Tahun 2017; penelitian Dewi Purnima, Choirul Saleh, dan Irwan Noor Tahun 2017; penelitian Nurafni Kustianingsih, Muslimin dan Abdul Kahar Tahun 2018; dan penelitian Hendra Hendrawati, Dekrita Komarasakti, dan Surya Ansori Tahun 2018). Dapat diketahui dari hasil perhitungan uji t bahwa Dana Alokasi Umum dialokasikan terlalu besar maka Kemandirian Fiskal akan rendah dan berpengaruh juga terhadap Desentralisasi Fiskal dan sebaliknya juga apabila Dana Alokasi Umum dialokasikan terlalu rendah maka Kemandirian Daerah akan tinggi dan berpengaruh juga terhadap Desentralisasi Fiskal. Sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh yang rendah terhadap Desentralisasi Fiskal maka Daerah tersebut memiliki Kemandirian Fiskal yang tinggi (Purnima, 2017).

Sedangkan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus tidak ada kaitannya dengan Desentralisasi Fiskal sesuai dengan (penelitian Jhon Agustinus Tahun 2013; penelitian Rose Atugonza, David Mwanje Ssenabulya, Geoffrey Boaz Hiie, Richard Kanyerezi dan Joseph Kimoga Tahun 2016; penelitian Hadi Sasana Tahun 2016; penelitian Khoirul Anwar dan Kidya Primta Surbakti Tahun 2017; penelitian Hayatun Nufus dan Jhon Andra Asmara Tahun 2017; penelitian Syapsan Tahun 2017;dan penelitian M. Zahari. MS, Syamsurijal Tan, Haryadi, dan

Syaparuddin Tahun 2018). Karena tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap variabel tersebut (Purnima, 2017).

Maka dari itu yang melatarbelakangi Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Desentralisasi Fiskal di Negara berkembang yaitu dikarenakan pemerintah berupaya untuk memperbaiki efisiensi ekonomi, memperbaiki akuntabilitas, meningkatkan sumber daya dan tercapainya efektivitas biaya dengan mengalokasikan 26% dari total Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk alokasi belanja Daerah. Penelitian ini mencoba menjelaskan pengaruh tingkat Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Desentralisasi Fiskal dikarenakan adanya inkonsistensi dari hasil penelitian terdahulu dan juga sebagai inovasi baru dari penggabungan beberapa variabel yang telah diteliti untuk dijadikan sebuah penelitian baru dengan melihat pengaruh tingkat Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus di kota Tasikmalaya selama sepuluh (10) periode terhadap kebijakan Desentralisasi Fiskal atas pemberian kewenangan fiskal yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam pengambilan keputusan anggaran untuk Pemerintah kota Tasikmalaya dalam penerimaan dan pengeluaran anggaran di Kota Tasikmalaya.

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan	Sumber
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.	Andrini Agus Tiyaningsih, 2009, Kota Malang Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Malang	Variabel yang digunakan Desentralisasi Fiskal	Tempat penelitian	Ketergantungan Pemerintah Kota Malang terhadap Desentralisasi Fiskal masih tinggi, dengan kata lain Pemerintah Kota Malang masih belum dapat mandiri	Jurnal Ekonomi Pembangunan , Vol. 7, No. 2, Desember 2009
2.	Enceng, Liestyodono B Irianto dan Purwaningdyah MW, 2012, Kabupaten Purworejo Desentralisasi fiskal penerimaan keuangan daerah	Variabel yang digunakan Desentralisasi Fiskal dan Pendapatan Daerah	Tempat penelitian	Pendapatan keuangan lokal di Kabupaten Purworejo berasal dari pemerintah pusat dengan rata-rata 82,68% pertahun, sedangkan PAD hanya 7,99%. Dengan begitu dapat diketahui Kemandirian Fiskal pada Kabupaten Purworejo masih sangat rendah	Jurnal Ilmu Administrasi, Vol.12, No. 1, Juli 2012, hlm. 1-73
3.	Anastasia Sianturi, Sjamsiar Sjamsuddin, dan Tjahjanulin Domai. 2013. Kota Batu Peran Pendapatan Asli Daerah dalam Menunjang Desentralisasi Fiskal dan	Variabel yang digunakan desentralisasi fiskal	Variabel yang digunakan Pendapatan Asli Daerah dan Pembangunan Daerah	Pendapatan Asli Daerah Kota Batu memiliki derajat Desentralisasi Fiskal yang berpengaruh negatif Pendanaan Transfer Pemerintah Pusat berpengaruh Positif	Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 3, Hal. 557-563

	Pembangunan daerah, Dinas Pendapatan Kota Batu			terhadap Desentralisasi Fiskal Pembiayaan berpengaruh negatif terhadap Desentralisasi Fiskal	
4.	Jhon Agustinus, 2013, Provinsi Papua *Phenomoenology Study on Financial Performance and Management Accountability of Special Autonomy Funds Allocated for Education at the Province of Papua*	Variabel yang digunakan Dana Otonomi Khusus	Variabel yang digunakan Kinerja keuangan dan Akuntabilitas Manajemen	Kurangnya kapasitas dalam menangani dana dan pengelolaan anggaran yang belum sesuai dan tidak dilaksanakan dengan tepat	*Gadjah Mada International Journal of Business, Vol. 15, No. 1 Januari-April 2013, pp. 79-94.* ISSN: 1141-1128
5.	Dewi Purnima, Choirul Saleh, dan Irwan Noor, 2014, Kabupaten dan Kota di Jawa Timur, Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Alokasi Khusus dengan Kemandirian Fiskal dan Desentralisasi Fiskal sebagai Variabel Moderating	Variabel yang digunakan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Desentralisasi Fiskal	Variabel yang digunakan Dana Bagi Hasil dan Kemandirian Keuangan	Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus bersama-sama berpengaruh positif terhadap kemandirian Fiskal Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Timur Dana Bagi Hasil secara pasrial tidak berpengaruh terhadap kemandiian keuangan, sedangkan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi khusus berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Fiskal Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Timur Desentralisasi fiscal dapat memoderasi pengaruh Dana Bagi	Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 3, No. 6, halaman 969-95

				Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kemandirian Fiskal Provinsi Jawa Timur	
6.	Muhamad Yamin Noch, Made Sudarma, Gugus Irianto, dan Ali Djamhuri, 2015, Provinsi Papua *Accountability of Special Autonomi Fund in Papua*	Variabel yang digunakan Dana Otonomi Khusus	Variabel yang digunakan Politik Ekonomi Akuntansi	Implementasi Dana Otonomi Khusus masih tidak memadai untuk menciptakan kesejahteraan bagi Papua	*Australian Journal of Basic and Applied Sciences, Vol. 9, Issue. 31, September 2015, pp. 645-651* ISSN: 1991-8178
7.	Hadi Sasana, 2016, Semua Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Analisis dampak transfer pemerintah terhadap kinerja fiskal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawab Tengah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal	Variabel yang digunakan dana transfer	Tempat penelitian	Transfer pemerintah pusat dan pendapatan domestik regional bruto perkapita berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah, pengeluaran rutin dan pembangunan. Indeks harga konsumen memiliki pengaruh positif dan signifikan Mempengaruhi pengeluaran rutin dan tidak ada hubungannya dengan pengeluaran pembangunan.	Jurnal Ekonomi Pembangunan , Vol. 7, No. 2, Desember 2016, hlm. 223-242
8.	Thi Thuy Nguyen, 2016, Vietnam *Fiscal Decentralization Trends in Vietnam*	Variabel yang digunakan *Fiscal Decentralization*	Tempat penelitian	Desentralisasi merupakan suatu proses yang memiliki pengaruh yang berkesinambungan dan juga pada era Reformasi harus	*Public Administration and Policy (PAAP), Vol. 19 Issue. 2, 2016, pp. 31-41*

				dilakukan Desentralisasi sebagai upaya untuk meningkatkan Desentralisasi Fiskal di Vietnam dimasa depan	
.9.	Rose Atugonza, David Mwanje Ssenabulya, Geoffrey Boaz Hiie, Richard Kanyerezi dan Joseph Kimoga, 2016, Universitas Makerere *Institutional Autonomy in Allocation of Income among the Various Categories of Expenditure in Higher Education*	Variabel yang digunakan Alokasi Pendapatan	Variabel yang digunakan Pengeluaran Untuk pendidikan	Kebijakan otonomi kelembagaan dalam alokasi pendapatan lebih banyak menghasilkan dana untuk menambah konstribusi pemerintah dan juga pengeluaran ditentukan secara otonomi karena otoritas persetujuan tidak sesuai dengan spesifikasi tingkat manajemen	*International Journal in Higher Education,Vol . 1, No. 2, 2016* ISSN: 2380-9183
10.	Khoirul Anwar dan Kidya primta Surbakti, 2017, Kabupaten/Kota di Indonesia Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Publik Kabupaten/Kota di Indonesia	Variabel yang digunakan Desentralisasi Fiskal	Variabel yang digunakan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Publik	Pengaruh positif desentralisasi fiskal terhadap besarnya belanja publik dan Transfer dana perimbangan ke daerah dan pendapatan lain-lain yang sah dipengruhi jumlah belanja publik daerah	*Proceeding* PESAT Vol. 5 Oktober 2017 ISSN 2303-1137
11.	Hayatun nufus dan Jhon Andra Asmara, 2017, Kota/Kabupaten di Provinsi Aceh Pengaruh pendapatan sendiri	Variabel yang digunakan Dana Perimbangan	Variabel yang digunakan Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Dana Otonomi	Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan mempengaruhi modal secara simultan dan sebagai pengeluaran.	Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), Vol. 2, No. 3, 2017, hlm. 1-9.

	dan dana perimbangan terhadap belanja modal dengan dana otonomi sebagai variabel pemoderasi pada Kota/Kabupaten di Provinsi Aceh			Dana otonomi khusus dapat memodersi hubungan pendapatan asli daerah dana perimbangan dengan pengeluaran modal	ISSN: 2581-1002
12.	R.Agoes Kamarullah, 2017, BPKAD Kabupaten Pemekasan. Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah.	Variabel yang digunakan Otonomi Daerah	Variabel yang digunakan Kemampuan keuangan	Tingkat kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Pamekasan disektor keuangan kurang, untuk itu diperlukan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara ekstensifikasi	Nuansa, Vol. 14, No. 1 Januari-Juni 2017
13.	Agus Bandiyono, 2017, Kepulauan Riau Transsfer dana sebagai bentuk desentralisasi fiskal bagi Pemerintah Daerah	Variabel yang digunakan Desentralisasi fiskal		Menjadikan bantuan pemerintah pusat maupun bagi hasil untuk menciptakan kesimbangan vertikal dan horizontal Menumbuhkan insentif dan adanya kendali bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan segala kewenangan yang menjadi tanggung jawab dengan baik	Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah, Vol. 12, No. 2, Mei 2017, hlm. 85-164
14.	Syapsan, 2017, Kota dan Kabupaten di Indonesia *The Influence of the Original Revenue, Balance Fund and Regional Income Area at The Level of*	Variabel yang digunakan Dana Perimbangan	Variabel yang digunakan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan memiliki pengaruh signifikan sangat besar terhadap Pendapatan Daerah dan juga adanya Desentralisasi Fiskal yang dapat membuat	*International Journal of Financie and Accounting, Vol. 6, No. 1, 2017, pp. 1-7*

	Provinces and Regional/City in Indonesian			masyarakat bebas merasakan kebebasan politik dalam transfaransi fiskal	
15.	Joko Tri Haryanto, 2017, Indonesia *Mapping The Local Own Resources Performance and Regional Dependence in Indonesia 2008-2014*	Variabel yang digunakan Desentralisasi Fiskal	Variabel yang digunakan Pendapatan Asli Daerah	Sebagian besar Daerah di Indonesia mengalami ketergantungan kepada dana Pemerintah dan sebagian Daerah pun masih belum mandiri	*Jurnal bina Praja, Vol. 9, Issue. 1, 2017, pp. 41-52* *ISSN: 2085-4323*
16.	Aidil Fikri Hasirimi, Prof. Erlina. SE.M.Si.Ph.D.Ak.CA, dan Prof. Dr. H. B. Tarmizi. SU, 2017, Provinsi Aceh *Analysis of Allocation Funds on Community Welfare in Blangkerejen District Gayo Lues Regency Aceh Province*	Variabel yang digunakan Dana Alokasi	Variabel yang digunakan Kesejahteraan Masyarakat	Kebijakan Program Dana Alokasi Kampung di Kabupaten Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues berjalan cukup baik dan dapat dilihat dari program Alokasi Dana Kampung dengan variabel pembangunan desa dan non-fisik pembangun kampung memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues	*Gadjah Mada International Journal of Business, Vol. 15, No. 1 Januari-April 2013, pp. 79-94* ISSN: 1141-1128
17.	Nurafni Kustianingsih, Muslimin dan Abdul Kahar, 2018, Kota/Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah	Variabel yang digunakan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus	Variabel yang digunakan Pendapatan Asli Daerah dan Kemandirian Daerah	Pendapatan daerah dan alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap tingkat independent Kabupaten/Kota di	Katagolis, Vol. 6, No. 6, Juni 2018, Hlm. 82-91 ISSN: 2302-2019

	Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap tingkat kemandirian daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.			Provinsi Sulawesi Tengah	
18.	Henda Hendawati, Dekrita Komaraasakti, dan Surya Ansori, 2018, kota Bandung *The Effect of Capital Cost and General Allocation Fund To The Regionl Financial Independencein Bandung City Govermeent*	Variabel yang digunakan *General Allocation Fund*	Variabel yang digunakan *Capital Cost* dan *Regionl Financial Independencei n*	Biaya Modal memiliki pengaruh Positif terhadap level Otonomi Daerah dan digunakan untuk meningkaatkan kapasitas fiskal Daerah Dana Alokasi Umum memiliki efek negatif pada tingkat keuangan Daerah	*The International Journal of Business Review, Vol. 1, Issuee. 2, 2018, pp. 141-149*
19.	Idhar Yahya, Erlina, Ade Fatma, Lubis dan Murni Daulay, 2018, Kota/Kabupaten di Indonesia *Fiscal Decentralization on Quality Regional Financial Report in Distric/City Government*	Variabel yang digunakan Desentralisasi Fiskal	Variabel yang digunakan Regional pelaporan keuangan	Perencanaan anggaran, administrasi keuangan, dan implementasi teknologi informasi memiliki efek parsial terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah di pemerintah Sumatera Barat	*International Journal of Cevil Engineering and Technologi (IJCIET), Vol. 9, Issue 9, September 2018, pp. 569-584*
20.	M. Zahari. MS, Syamsurijal Tan, Haryadi, dan Syaparuddin, 2018, Provinsi Jambi	Variabel yang digunakan Desentralisasi Fiskal	Variabel yang digunakan Kesejahteraan Masyarakat	Derajat desentralisasi fiscal dengan ration pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Jambi relatif	Jurnal Prespektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, Vol. 6, No. 3,

	Analysis of Fiscal DecentralizationImpact on Community Welfare in Jambi Province	rendah, sedangkan untuk Provinsi Jambi dalam kategori baik Kesejahteraan masyarakat dalam kategori baik, kecuali di Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh dalam kondisi tinggi	November-Desember 2018 ISSN: 2355-8520
	Maya Rahmawati, 2020: Penelitian Penulis Judul: Pengaruh Tingkat Dana Alokasi Umum dan Tingkat Dana Alokasi Khusus Terhadap Desentralisasi Fiskal (Studi Kasus pada Pemerintahan Kota Tasikmalaya Tahun 2007-2016)		

Berdasarkan urain yang melatarbelakangi hal tersebut dengan adanya inkonsistensi dari hasil penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Tingkat Dana Alokasi Umum (DAU) dan Tingkat Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Desentralisasi Fiskal" (Studi Kasus pada Pemerintahan Kota Tasikmalaya Tahun 2007-2016).** Sebagai inovasi baru dari penggabungan beberapa variabel yang telah diteliti untuk dijadikan sebuah penelitian baru.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka identifikasi permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Tingkat Dana Alokasi Umum, Tingkat Dana Alokasi Khusus dan Desentralisasi Fiskal di Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2007-2016.
2. Bagaimana pengaruh Tingkat Dana Alokasi Umum dan Tingkat Dana Alokasi Khusus secara parsial terhadap Desentralisasi Fiskal di Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2007-2016.
3. Bagaimana pengaruh Tingkat Dana Alokasi Umum dan Tingkat Dana Alokasi Khusus secara simultan terhadap Desentralisasi Fiskal di Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2007-2016.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tujuan yang dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Tingkat Dana Alokasi Umum, Tingkat Dana Alokasi Khusus dan Desentralisasi Fiskal di Kota Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Dana Alokasi Umum dan Tingkat Dana Alokasi Khusus secara parsial terhadap Desentralisasi Fiskal di Kota Tasikmalaya.
3. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Dana Alokasi Umum dan Tingkat Dana Alokasi Khusus secara simultan terhadap Desentralisasi Fiskal di Kota Tasikmalaya.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1. Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam pengelolaan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus yang diberikan oleh Pemerintah pusat dalam perkembangan Desentralisasi Fiskal Kota Tasikmalaya.

1. Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk bahan referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian dengan topik yang terkait dan dengan masalah yang diteliti.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pemerintahan Kota Tasikmalaya melalui data sekunder yang dilansir dalam *website* Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistika dengan sempel penelitian yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Pinjaman yang diterima Pemerintah Kota Tasikmalaya selama sepuluh periode Tahun 2007-2016.

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu yang ditempuh untuk melakukan penelitian ini selama delapan (8) bulan dari bulan Februari hingga September 2020.